

CHECK DIGITAL EDITION

BOM BUNUH DIRI ITU BERNAMA UTANG

Lampau Batas Aman IMF, BPK Takut RI Gagal Bayar

Narasi bila utang Indonesia aman meski sudah tembus Rp 6.527,29 triliun per April 2021 terus digaungkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI). Sayangnya, kekhawatiran pun kini mulai menyeruak dari internal pemerintah sendiri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku cemas negara tidak mampu membayar utang tersebut beserta bunganya. Apalagi indikator kerentanan utang pada 2020 saja telah melewati batas yang direkomendasikan IMF. Ratio debt relief Indonesia mencapai 46,77 persen, sementara rentang IMF sebesar 25-35 persen. Apakah Indonesia sudah mengarah ke jurang hitam gagal bayar alias default? Waspadalah! utang yang diharapkan bantu tangani pandemi bisa berujung jadi 'bom bunuh diri'.

Baca Hal 11

UTANG PEMERINTAHAN INDONESIA
(2017-2020)



7 NEGARA DENGAN UTANG LUAR NEGERI TERTINGGI

| | |
|--------------|------------------------|
| 1. CHINA | 2,1 Triliun Dolar AS |
| 2. BRASIL | 569,39 Miliar Dolar AS |
| 3. INDIA | 560,39 Miliar Dolar AS |
| 4. RUSIA | 490,72 Miliar Dolar AS |
| 5. MEKSIKO | 469,72 Miliar Dolar AS |
| 6. TURKI | 440,78 Miliar Dolar AS |
| 7. INDONESIA | 402,08 Miliar Dolar AS |

UTANG



GOVERNMENTTODAY**DISINFORMASI! HEBOH IVERMECTIN UNTUK TERAPI CORONA, TERNYATA OBAT CACING**

Jakarta- Polemik penggunaan obat Ivermectin sebagai terapi Covid-19 yang diklaim Menteri BUMN Erick Thohir telah mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mencuat. Menteri Erick dituding bohong karena kenyataannya izin edar hanya untuk mengatasi parasit seperti cacing.

"Nggak pernah disetujui Badan POM itu obat terapi Covid. Nggak pernah. Kata siapa? Itu berita hoaks. Enggak apa-apa, itu obat lama, obat untuk obat cacing, obat rabies. Siapa bilang yang setuju (untuk Covid-19)? Erick Thohir bohong. Menteri kok bohong. BPOM itu cek lagi izin edarnya, hanya untuk antiparasit. Enggak pernah untuk atasi Covid," jelas ahli wabah Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono, Selasa (22/6).

Seperti diketahui, Menteri Erick sebelumnya bilang obat tersebut akan diproduksi massal oleh perusahaan farmasi pelat merah Indofarma. Saat ini obat tersebut masih dalam tahap uji stabilitas. Namun sudah masuk dalam tahap produksi sebanyak 4 juta butir.

Menurut Pandu, izin yang dikeluarkan oleh BPOM harus termasuk izin penggunaan untuk penyakit tertentu. Hal tersebut juga harus didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang cukup kuat. "Harus ada izin dari BPOM termasuk apakah izin penggunaan, untuk penyakit apa dan sebagainya. Dan untuk mengajukan itu harus ada bukti-bukti

ilmiahnya. Belum bisa. Badan litbang baru akan bikin risetnya setelah desakan publik," jelas Pandu.

Selain itu, ia juga mengatakan telah menanyakan langsung pada pihak BPOM mengenai izin edar maupun penggunaan obat tersebut bagi pasien Covid-19. "Di twitter saya udah bilang kok bahwa itu enggak pernah. Saya kemarin cek tuh ketika Erick ngomong, betul enggak? Enggak, enggak pernah, Bu Rizka (BPOM) yang ngomong sama saya," ujar Pandu.

Hal senada diungkapkan Direktur Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi. Dia menegaskan uji klinis Ivermectin baru akan dimulai prosesnya. Maka dari itu belum ada kejelasan hasil terkait keamanan maupun khasiat Ivermectin untuk terapi Covid-19. "Belum (mulai uji Ivermectin). Baru akan dimulai," demikian tegas dr Nadia.

Lebih lanjut, ia menegaskan obat Ivermectin ini tetap harus di bawah pengawasan dokter. Pasalnya, tidak semua pasien kemudian membutuhkan hasil Ivermectin. "Ivermectin sudah ada izin edar dari BPOM, tapi cek indikasinya untuk apa ya," kata Nadia.

Lebih lanjut, dr Nadia juga menegaskan Ivermectin memang sudah mendapat izin edar BPOM tetapi untuk indikasi tertentu. Seperti rilis resmi BPOM per 10 Juni 2021, Ivermectin

kaplet 12 mg terdaftar di Indonesia untuk indikasi infeksi kecacingan atau obat cacing.

Terpisah, Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, "Untuk Ivermectin sudah mendapat EUA (Emergency Use Authorization) dari BPOM sebagai obat cacing, jadi (obat) pencernaan," kata Penny dalam jumpa pers virtual, Selasa (22/6). "Di lapangan dalam pelaksanaan pengobatan Covid-19 di beberapa negara dan Indonesia ditemukan adanya indikasi bahwa ini membantu penyembuhan. Namun belum bisa dikategorikan sebagai obat Covid-19," tegasnya.

Penny menambahkan, kalau Ivermectin mau disebut sebagai obat Covid-19 harus melalui uji klinis lengkap dulu. Namun dalam hal pemberian kepada pasien, itu kewenangan dari dokter dan ahli kesehatan lainnya.

Penny menegaskan, penggunaan Ivermectin sebagai terapi di luar wewenang BPOM. "Bukan dalam kewenangan BPOM dalam hal itu, nanti pemerintah proses dan setiap protokol pengobatan Covid-19 harus diatur organisasi profesi dan Kemenkes," tutup dia.

Pembelaan Kementerian BUMN

Sementara itu Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan Menteri BUMN Erick Thohir tidak pernah menyebut Ivermectin sebagai obat covid-19. Kata Arya, Erick menga-

takan Ivermectin merupakan salah satu terapi bagi orang yang terjangkit virus Covid-19.

"Ada kesalahan yang informasi ataupun yang disampaikan beberapa pihak mengenai ivermectin. Yang pasti Pak Erick tidak pernah berbicara Ivermectin itu sudah dpt izin dari BPOM untuk obat corona, justru beliau mengatakan BPOM memberikan izin edar Ivermectin untuk antiparasit. Ivermectin ini seperti disampaikan Pak Erick itu bisa menjadi terapi untuk orang yang terkena corona," ujar Arya di Jakarta, Selasa (22/6).

Arya mengatakan sampai saat ini belum ada obat khusus untuk corona. Arya mengatakan Ivermectin tak berbeda dengan Oseltamivir, Favipiravir, dan Remdesivir yang merupakan terapi dan mendapatkan rekomendasi dari dokter. "Ivermectin salah satu terapi yang bisa dipakai dokter tapi tergantung dokter, posisinya sama saja seperti Oseltamivir, Favipiravir, itu semua terapi dan belum ada satu pun mengatakan itu untuk corona," ungkap Arya.

Arya mengatakan Ivermectin sebagai terapi telah digunakan di India dan juga dokter-dokter di Indonesia, serta telah memiliki jurnal ilmiah mengenai pemakaian Ivermectin itu sebagai terapi. Arya meminta upaya BUMN dalam membantu penanganan Covid-19 tidak direcoiki dengan isu-isu yang tidak benar. (ist)

DERETAN PERNYATAAN BLUNDER PEJABAT TINGGI RI TERKAIT PANDEMI

24 JANUARI 2020

Presiden Jokowi Tegaskan Virus Corona belum masuk Indonesia



27 JANUARI 2020

Menteri Terawan minta publik tidak panik hadapi Corona dan "enjoy aja"



11 FEBRUARI 2020

Menkes Terawan menantang peneliti Harvard buktikan corona sudah masuk Indonesia



15 FEBRUARI 2020

Menkopulhukam Mahfud MD sebut virus Corona sulit untuk masuk Indonesia karena izin berbelit-belit



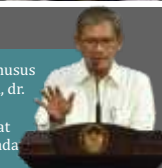
15 FEBRUARI 2020

Menkes Terawan salahkan warga yang beli masker dengan harga mahal



27 MARET 2020

Jubir pemerintah khusus penanganan corona, dr. Achmad Yurianto meminta masyarakat saling menolong hadapi pandemik corona



14 MARET 2020

Menkes Terawan jadikan 188 ABK World Dream Duta Imunitas corona usai jalani observasi di Pulau Seribu



27 FEBRUARI 2020

Wapres Ma'ruf Amin sebut Corona tidak masuk Indonesia karena doa Kiai dan doa Qunut



24 FEBRUARI 2020

Setditjen pencegahan dan pengendalian penyakit, Kemenkes dr. Ahmad Yurianto sebut Sars-CoV-2 berbeda dengan virus Covid-19



17 FEBRUARI 2020

Menhub sebut Corona tidak bisa masuk Indonesia karena warga makan nasi kucing



1 APRIL 2020

Jokowi tolak lockdown dan pilih PSBB



2 APRIL 2020

Menko Luhut sebut virus corona gak kuat di cuaca Indonesia.



2 APRIL 2020

Jubir Presiden Fadjoel Rachman sebut mudik tak dilarang. "Asal pemudik wajib isolasi mandiri."



22 APRIL 2020

Jokowi sebut pulang kampung berbeda dengan mudik. Mudik dilakukan saat Lebaran, pulang kampung dilakukan sebelum Ramadan.



27 APRIL 2020

Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo targetkan warga Indonesia bisa kembali hidup



21 JANUARI 2021

Jokowi beri isyarat setuju dengan vaksin mandiri



18 DESEMBER 2020

Jokowi targetkan kehidupan kembali normal usai 70 persen WNI disuntik vaksin



10 JULI 2020

Jubir pemerintah khusus penanganan corona, dr. Achmad Yurianto akui penggunaan istilah new normal



3 JULI 2020

Mentan Syahrul Yasin Limpo kenalkan kalung anti corona, eucalyptus



15 MEI 2020

Jokowi minta warga hidup berdampingan dengan corona "Kita harus hidup berdamaian dengan Corona"



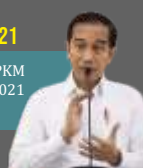
21 JANUARI 2021

Jokowi beri isyarat setuju dengan vaksin mandiri



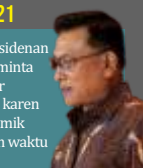
31 JANUARI 2021

Jokowi sebut PPKM 11-25 Januari 2021 tidak efektif



7 FEBRUARI 2021

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko minta Bloomberg belajar dulu ke Indonesia karena perkiraan pandemik baru selesai dalam waktu 10 tahun



19 FEBRUARI 2021

Kepala Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo targetkan pandemik terkendali di RI pada Agustus 2021



21 JUNI 2020

Menteri BUMN Erick Thohir klaim Indonesia miliki obat terapi pemulihan COVID-19 yaitu Ivermectin yang merupakan obat minum anti parasit. Hal itu langsung mendapat bantahan dari berbagai pihak, karena Ivermectin adalah obat cacing dan belum direkomendasikan dokter untuk terapi corona.



CATAT! SEKARANG KEMENTERIAN INVESTASI MITRA KOMISI VI, KEMENPERIN KE VII

Jakarta- Curhatan anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti terkait minimnya mitra komisinya membuah hasil. Kini Komisi VII DPR bertambah mitra yakni Kementerian Perindustrian yang tadinya berada di Komisi VI. Sementara, Kementerian Investasi masuk menjadi mitra komisi VI.

"Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti bamus tanggal 17 Juni 2021 memutuskan penetapan mitra kerja yaitu: Kementerian Pendidikan Kebudayaan riset dan Teknologi (tetap) menjadi mitra kerja komisi X DPR RI. Kementerian Investasi menjadi Mitra kerja Komisi VI DPR RI," kata Ketua DPR Puan Maharani dalam paripurna Selasa (22/6).

Perubahan nomenklatur kementerian berdampak pada perubahan mitra kerja di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI. Yaitu meleburnya Ristek menjadi Kemendikbud Ristek dan lahirnya kementerian baru Kementerian Investasi.

Walhasil, dalam paripurna DPR tersebut ditetapkan Kemendikbud Ristek tetap di Komisi X, dan Kementerian Investasi di Komisi VI. Selain itu, untuk mengganti Kemenristek yang dilebur, Kementerian Perindustrian kini menjadi mitra Komisi VII.

"Selanjutnya dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas pada alat kelengkapan dewan rapat konsultasi pengganti bamus juga memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi Mitra kerja Komisi VII," sambung Puan.

Dijelaskan Puan, berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan DPR RI

tentang Tata Tertib DPT menyatakan bahwa mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B dapat dilakukan sesuai perkembangan dan kebutuhan.

"Pasal 19 ayat 1 UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan bahwa perubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR RI sesuai Pasal 56 ayat 1 Peraturan DPR tentang Tatib menyatakan bahwa jumlah dan ruang lingkup tugas mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR," urai Puan.

Cucu Bung Karno ini selanjutnya menanyakan keputusan peserta paripurna yang hadir. "Apakah penetapan ini dapat disetujui," tanya Puan. "Setuju," sahut anggota DPR. Kendati demikian, Puan juga meminta persetujuan anggota perubahan mitra kerja tersebut baru bisa dilakukan setelah selesainya RAPBN 2022.

"Kami juga meminta persetujuan pemberlakuan penetapan mengenai mitra kerja tersebut dimulai setelah selesai Pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022, apakah dapat disetujui," tanya Puan lagi. "Setuju," jawab Anggota.

Manuver Dyah Roro

Seperti diketahui, sebelumnya curhatan Dyah itu diungkapkan dalam interupsi di rapat paripurna pembukaan masa sidang V tahun 2020-2021. Dyah mengutarakan keluhan para anggota Komisi VII karena mitranya hanya Kementerian ESDM.

"Saya ingin mengutarakan isi hati mayoritas atau mungkin seluruh Komisi VII saat ini. Seperti yang kita ketahui saat ini Komisi VII hanya



Rapat paripurna DPR RI, Selasa (22/6/2021) terkait perubahan mitra komisi VI dan VII.

bermitra dengan satu kementerian, yaitu Kementerian ESDM mengingat Ristek sudah bergabung dengan Kemendikbud maka otomatis menjadi mitra Komisi X dan Kementerian LHK bermitra dengan Komisi IV yang tentu berbeda dengan periode sebelumnya di mana pada waktu itu KLHK bermitra dengan dua komisi, yaitu Komisi IV dan Komisi VII," kata Roro dalam interupsinya, Kamis (6/5/2021).

Roro menilai keberadaan Komisi VII DPR akan merasa sia-sia jika hanya bermitra satu kementerian. Dia meminta pimpinan DPR untuk menambah mitra Komisi VII DPR. Jika tidak menurutnya lebih baik komisi VII dibubarkan.

"Intinya pimpinan, menurut saya akan kurang efektif jika Komisi VII ini

hanya bermitra dengan satu kementerian. Mengingat juga ada total 33 kementerian dan 11 komisi di DPR RI. Logikanya, satu komisi bermitra dengan satu kementerian ketika kita bagi rata-rata. Maka dari itu saya mohon sekali pertimbangan dari pimpinan DPR untuk dapat menambah mitra yang tentunya cocok untuk Komisi VII baik di sektor energi, lingkungan ataupun ristek," ujarnya.

"Dengan tujuan agar kami dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal dan sebaik mungkin dan kalau tidak demikian saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saja. Lebih baik kita digabungkan dengan komisi lain saja. Jadi saya mohon, saya mohon sekali pertimbangannya. Makasih," katanya. (ist)

PERUBAHAN MITRA DPR RI BERDASARKAN KOMISI

Komisi VI

- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Koperasi dan UKM
- Kementerian BUMN
- Kemnertian Investasi
- Kementerian Investasi

Komisi VII

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kementerian Perindustrian

Komisi X

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Pemuda dan Olahraga

KATA MEREKA

Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti bamus tanggal 17 Juni 2021 memutuskan penetapan mitra kerja yaitu: Kementerian Pendidikan Kebudayaan riset dan Teknologi (tetap) menjadi mitra kerja komisi X DPR RI. Kementerian Investasi menjadi Mitra kerja Komisi VI DPR RI. Selanjutnya dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas pada alat kelengkapan dewan rapat konsultasi pengganti bamus juga memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi Mitra kerja Komisi VII

KETUA DPR PUAN MAHARANI
(SELASA, 22/6/2021)

Saya ingin mengutarakan isi hati mayoritas atau mungkin seluruh Komisi VII saat ini. Seperti yang kita ketahui saat ini Komisi VII hanya bermitra dengan satu kementerian, yaitu Kementerian ESDM. Intinya pimpinan, menurut saya akan kurang efektif jika Komisi VII ini hanya bermitra dengan satu kementerian. Dengan tujuan agar kami dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal dan sebaik mungkin dan kalau tidak demikian saya rasa lebih baik Komisi VII dibubarkan saja. Lebih baik kita digabungkan dengan komisi lain saja.

ANGGOTA KOMISI VII DPR
DYAH RORO ESTI
(KAMIS, 6/5/2021)



SOAL DAGING & SAPI TULUNGAGUNG TERKENA ANTRAKS

PEMKAB BLITAR MELARANG MASUK, PEMKOT MENGIZINKAN DENGAN SYARAT

BLITAR – Menjelang Idul Adha, pemerintah di Blitar Raya mulai mengawasi keluar-masuknya hewan kurban dari kota lain. Namun, terkait ditemukannya penyakit antraks di daging dan sapi asal Tulungagung, Pemkab Blitar dan Pemkot Blitar memiliki kebijakan berbeda.

Kabupaten Blitar dengan tegas melarang masuknya daging dan ternak dari wilayah Kabupaten Tulungagung. Sementara Pemkot memilih menerima namun dengan berbagai pengetatan dan persyaratan.

"Untuk pencegahan meluasnya wabah, Pemkab Blitar mencegah masuknya ternak dari Kabupaten Tulungagung," ujar Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Pemkab Blitar, Adi Andaka dikutip Selasa (22/6).

Larangan itu di Pemkab Blitar tertuang dalam SE Nomor 524.3/606/409.115.2/2021, yang ditujukan kepada semua camat dan kepala desa di Kabupaten Blitar. Larangan ini untuk meningkatkan kewaspadaan bersama, akan potensi penyebaran penyakit Antraks yang sedang mewabah di Kabupaten Tulungagung.

Dijelaskan Adi bahwa sesuai UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Hewan, pemerintah wajib melindungi kesehatan hewan dan manusia beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal (Asuh).

"Termasuk hewan ternak ruminansia, seperti kambing, sapi, kerbau dan domba," jelasnya.

Kewaspadaan ditingkatkan agar masyarakat agar menyebelahi hewan yang terpapar penyakit. Apalagi penyakit Antraks yang dapat menularkan ke manusia. "Kita harus tingkatkan kewaspadaan masuknya hewan ruminansia dari luar daerah, apalagi dari Tulungagung kami cegah masuk kesini," tandas Adi.

Adi menerangkan Antraks merupakan penyakit pada hewan ternak ruminansia dengan kematian tinggi. Gejala yang dialami ternak diantaranya demam tinggi, sesak nafas, pembengkakan cepat pada tenggorokan. Keluar darah dari lubang alami, kejang kemudian mati. "Kami minta warga segera melapor, jika menemukan gejala seperti itu pada ternaknya. Termasuk menemukan daging limpa dengan kondisi lebih besar ukurannya dari ukuran normal atau melebihi ukuran hati," terangnya.

Terpisah, Pemkot Blitar melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Rodiyah mengatakan tetap menerima hewan ternak dari Kabupaten Tulungagung, dengan melakukan pengetatan pengawasan lalu lintas perdagangan hewan khususnya sapi. "Untuk mengantisipasi dan mencegah penularan penyakit bakteri antraks pada hewan ternak di Kota Blitar. Meskipun sampai saat ini belum ada temuan, hewan ternak terinfeksi



Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar melakukan sosialisasi pencegahan Antraks di Pasar Hewan Dimoro.

Antraks di Kota Blitar," katanya.

Diungkapkan Rodiyah, pengetatan pengawasan perdagangan hewan ternak khususnya sapi dilakukan di pasar hewan, peternak maupun jagal sapi di Kota Blitar. "Seperti di Pasar Hewan Dimoro, merupakan pusat perdagangan hewan terbesar di Kota Blitar. Tiap hari Pasaran Jawa Pon dan Legi, banyak pedagang sapi dari luar Kota Blitar termasuk Tulungagung yang datang di Pasar Hewan Dimoro," ungkapnya.

Petugas akan memperketat pengawasan dan pengecekan terhadap sapi yang datang di Pasar Hewan Dimoro. Tiap transaksi sapi dari luar kota, khususnya dari Tulungagung harus menunjukkan Surat Kesehatan Hewan. "Kalau tidak punya, kami anjurkan memeriksa

kan sapi di Puskesmas Hewan di sekitar Pasar Hewan Dimoro," tegas Rodiyah.

Ditambahkan Rodiyah pihaknya juga minta peternak dan jagal, untuk tetap menjaga kebersihan dan sanitasi agar lingkungan tetap sehat. "Langkah ini sebagai upaya untuk memastikan hewan ternak yang masuk dan keluar Kota Blitar benar-benar dalam kondisi sehat," pungkasnya.

Seperti diketahui, penyakit bakteri antraks ditemukan pada hewan ternak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya ada 26 ekor sapi dan tiga kambing yang mati di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungwaru. Satu sapi terakhir yang diambil sampelnya menunjukkan, sapi tersebut mati karena serangan bakteri Antraks. (ais)

SOSIALISASIKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PEMKOT MALANG GEBER 244 KEGIATAN

Malang – Tak sekadar membangun Kota Malang yang modern dan maju, Walikota Drs. Sutiaji berharap ada keterbukaan informasi publik terkait pembangunan infrastruktur. Harapannya, masyarakat bisa ikut mengawal bersama-sama. Menurut data saat ini ada sekitar 244 pembangunan infrastruktur yang sedang digeber kota tersebut.

"Infrastruktur adalah bagian penting dari pembangunan Kota Malang, selain sektor pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur yang memadai, akan menopang ekonomi yang lebih maju nantinya, kalau infrastruktur masih jauh, ya akan sulit mencapai kemajuan ekonomi juga," ujar Walikota Sutiaji dalam acara 'Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun 2021', Selasa (22/6).

Dia mengatakan gelaran ini juga

merupakan implementasi misi ke 4 Kota Malang. "Kita punya misi yang keempat, bahwa akuntabilitas seluruh proses pembangunan harus diketahui masyarakat. Baik inventarisasi, pendokumentasian, sampai kepada yang namanya dokumen anggaran," ujarnya.

Hal tersebut dirasa perlu, agar pembangunan memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi ke depan. Kemudian, lanjut Sutiaji, jika inventarisasi sudah terproses maka diperlukan pengawasan.

"Masyarakat harus mengawal bersama-sama, pembangunan jenis apa saja yang akan dijalankan di Kelurahan tempatnya tinggal. Supaya apa yang sudah dianggarkan itu sesuai, antara idealita dengan realitanya, tidak ada sekat yang begitu tebal," paparnya.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sutiaji terus

berupaya meningkatkan proses literasi masyarakat. "Semua ini adalah proses literasi pada masyarakat, mereka harus paham apa saja yang akan dibangun bagi mereka. Kalau dulu di zaman saya jadi ketua Rt-Rw, tidak tahu Malang itu bagaimana pembangunannya. Bahkan jumlah pembangunan di tiap kelurahan ada atau tidak, saya tidak tau," jelasnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya sosialisasi ini pada akhirnya diharapkan tumbuh rasa memiliki dalam diri masyarakat. "Karena pembangunan yang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu basicnya dari masyarakat. Sehingga harus dikawal oleh masyarakat, dan yang menikmati manfaatnya juga masyarakat," ujarnya.

Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan



Walikota Sutiaji dalam acara 'Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun 2021', Selasa (22/6).

dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP), Hadi Santoso, mengungkapkan bahwa terdapat 244 kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh pihaknya. "Dari ratusan itu, semua prioritas. Tidak ada pembangunan yang bukan prioritas," tegasnya.

PEGAWAI KPK CABUT GUGATAN DI MK TERKAIT TWK, ADA APA?

Jakarta- Sembilan pegawai KPK dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mencabut permohonan gugatan UU KPK yang sebelumnya telah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 10 Juni. Gugatan itu terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK.

Salah satu pegawai yang juga Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi KPK, Hotman Tambunan, mengatakan pencabutan permohonan telah dilakukan pada Jumat, 18 Juni. "Sembilan pegawai KPK yang menjadi pemohon dalam pengujian UU di Mahkamah Konstitusi mencabut permohonannya pada 18 Juni 2021," ujar Hotman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/6).

"Adapun UU yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," sambungnya.

Hotman menyatakan, pencabutan gugatan didasarkan 2 alasan. Pertama, para pegawai menilai MK telah memberikan payung hukum secara tegas berkaitan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Aturan itu ada dalam pertimbangan putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan proses alih status menjadi ASN tak boleh merugikan pegawai KPK dalam bentuk apa pun. Sebab peralihan status pegawai KPK menjadi ASN berbeda dengan masyarakat yang melamar sebagai PNS atau ASN. MK menyebut peralihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan konsekuensi hukum dari berlakunya UU KPK hasil revisi.

"Kedua, para pegawai merasa pertimbangan tersebut bersifat mengikat untuk semua pihak," ucap Hotman. "Sehingga, 2 alasan tersebut secara

tegas dan jelas sudah memberikan pedoman hukum dalam mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN," lanjutnya.

Mereka menilai terjadi penafsiran secara inkonstitusional terhadap Pasal 68 B ayat (1) dan Pasal 69 C UU Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur alih status pegawai menjadi ASN. Sebab dalam pelaksanaannya, proses alih status justru mensyaratkan TWK. Mereka sempat menyertakan berkas berisi 2.000 halaman yang menjadi bukti tambahan. Terdiri dari berbagai undang-undang, aturan, hingga e-mail pegawai. Namun permohonan tersebut kini dicabut.

Terpisah, Koordinator MAKI Boyamin Saiman beralasan pencabutan JR tersebut lantaran Covid-19 menunjukkan gejala penularan yang lebih parah. "Kami setuju dengan kebijakan Mahkamah Konstitusi untuk menunda persidangan sampai batas keadaan yang lebih baik dan sekaligus memahami terdapat upaya bersama untuk mencegah penularan virus Covid-19," papar Boyamin.

Dia berharap pencabutan permohonan itu mengurangi beban proses persidangan di Mahkamah Konstitusi akibat penularan virus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan. Di samping itu, Boyamin memandang pegawai KPK yang gugur akibat TWK telah mencabut permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. MAKI merasa tidak memiliki dasar hukum lagi.

Survei: Polri Lebih Dipercaya

Sementara itu, menurut Lembaga survei Cyrus Network menyatakan publik lebih percaya Polri ketimbang KPK. Survei Cyrus Network ini dilakukan pada 28 Mei-1 Juni 2021. Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 1.230 orang, yang tersebar



Petugas kebersihan membersihkan gedung KPK yang saat ini di dalamnya masih menyisakan polemik terkait TWK terkait peralihan status pegawai menjadi ASN.

secara proporsional pada 123 desa/kelurahan terpilih di 34 Provinsi.

Survei dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat kepercayaan (significant level) survei ini adalah 95%, dengan margin of error sebesar +/- 2,85%. Berdasarkan survei tersebut, Polri menempati urutan pertama. Dari 4 lembaga penegak hukum, termasuk Polri, KPK menempati urutan paling buncit.

"Kami menemukan Polri menempati peringkat teratas sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh publik, dengan 86,2% responden mengaku percaya terhadap Polri," kata Direktur Riset Cyrus Network Fadhlil MR. "Diikuti Mahkamah

Agung dengan 85,9%, kemudian 82,2% responden percaya terhadap Kejaksaan Agung, dan 80,7% percaya terhadap KPK," imbuhnya.

Mengapa publik saat ini justru lebih percaya Polri ketimbang KPK? Fadhlil menduga ada kaitannya dengan isu seputar KPK yang berembus belakangan ini.

Fadhlil menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat jika dibandingkan survei sebelumnya. Berdasarkan survei Cyrus Network sebelumnya, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hanya 60-an persen. "Angka ini naik meningkat jika dibandingkan dengan survei kami sebelumnya yang menunjukkan di angka 62,5%," ucapnya. (ist)

KEMENDIKBUDRISTEK NGOTOT SEKOLAH WAJIB BERI OPSI PTM, SURABAYA 'WAIT AND SEE'

SURABAYA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan belum ada perubahan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah di luar wilayah berstatus zona merah risiko Covid-19. Sekolah diwajibkan memberikan opsi atau pilihan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan.

Kebijakan PTM ini masih mengacu pada SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. "Sekolah tetap wajib memberikan opsi PTM terbatas maupun pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan orang tua tetap memiliki hak untuk menentukan anaknya untuk PTM terbatas maupun PJJ," kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Jumeri, Selasa (22/6).

Ia menjelaskan pengecualian PTM hanya di wilayah yang menerapkan

PPKM. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2021, sekolah di zona merah diinstruksikan belajar dari rumah.

Meski demikian, Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya mislanya memilih 'wait and see' melihat perkembangan zona penyebaran Covid-19 di sejumlah wilayah. Kepala Dindik Kota Surabaya, Supomo, mengatakan kalau zona di beberapa tempat memungkinkan, pihaknya pasti akan menggelar PTM. Pada dasarnya semua sekolah sudah siap.

"Karena sudah kami siapkan mereka ada simulasi. Sehingga, kapanpun dilakukan maka kami siap, termasuk di dalamnya ada persetujuan dari wali murid. Itu menjadi salah satu hal yang utama dalam," ujarnya, ketika ditemui di Balai Kota, Selasa (22/6).

Supomo menyampaikan, aturan itu kembali ke Pemerintah Provinsi karena wilayahnya memiliki 38

kabupaten/kota. Dindik Surabaya lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan anak-anak. "Jadi kami tidak akan gegabah dalam melakukan PTM apabila kondisi Surabaya tidak memungkinkan. Kembali pada zonanya sekarang seperti apa. Ketika zonanya merah kami tidak akan pembelajaran tatap muka. Ketika zonanya orange, kuning, akan melakukan sekian persen pembelajaran tatap muka," sambungnya.

Para guru, kata Supomo, harus komunikatif dalam menyampaikan materi kepada murid. Sehingga mereka tidak bosan atau jenuh, karena situasinya tidak memungkinkan dilakukan tatap muka. Dindik juga telah membagikan surat izin persetujuan PTM kepada orang tua secara online. Jadi, pihaknya siap menerima pertanyaan dari orang tua atau wali murid yang bisa disampaikan setiap hari. (Ard)



Walikota Surabaya Eri Cahyadi saat meninjau simulasi Pembelajaran Tatap Muka beberapa waktu lalu.

EMPAT PERSETUJUAN SYARAT MENYELENGGARAKAN PTM

1. Persetujuan dari pemerintah daerah (pemda) atau dinas pendidikan dan kebudayaan di wilayah zona hijau dan kuning.
2. Persetujuan kepala sekolah atau setelah sekolah dapat memenuhi protokol kesehatan yang ketat.
3. Adanya persetujuan wakil dari orang tua dan wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah meskipun kemudian sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka.
4. Adanya persetujuan dari orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju, peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

A professional portrait of Tatyana Bakalchuk, a woman with short black hair, wearing a light blue blazer over a white top. She is looking directly at the camera with a slight smile.

TATYANA BAKALCHUK

*Jadi Miliarder Rusia
Pasca Cuti Hamil, Kok Bisa?*

Tatyana Bakalchuk masuk deretan orang kaya di dunia. Orang Rusia keturunan Korea ini mengantongi kekayaan US\$1 miliar. Jalan meraih suksesnya pun mengejutkan. Dia berhasil membangun toko online saat mengambil cuti hamil. Bisa dicontoh nih!

Musim semi tahun 2004 jadi kenangan seumur hidup Tatyana Bakalchuk, miliarder Rusia berdarah Korea. Bagaimana tidak? Ia memutuskan cuti hamil dari pekerjaannya sebagai guru bahasa Inggris dan memulai bisnis ritel secara daring (e-commerce).

Tak disangka, usaha perempuan kelahiran Moskow, Rusia, pada 16 Oktober 1975 itu berbuah manis. Lewat merek dagang Wildberries, ia menjadi perempuan pengusaha terkaya nomor dua di Rusia.

Mengutip Forbes.com, kekayaan Bakalchuk per 18 Januari 2020 mencapai US\$1 miliar atau Rp14 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS). Karena kekayaannya tersebut, ibu dari empat anak tersebut masuk deretan orang terkaya di dunia.

Namun, Bakalchuk tidak menjadi kaya dalam sekejap mata. Ia merintis Wildberries sejak 2004. Ketika itu, bisnis ritelnya belum memiliki kantor tetap. Ia mendirikan Wildberries dari apartemennya bersama sang suami Vladislav Bakalchuk, yang bekerja sebagai teknisi TI.

Pada tahun-tahun awal, Bakalchuk hanyalah reseller (orang yang menjual kembali produk dari supplier) dari peritel

Jerman Otto. Berbekal foto produk dan jaringan internet, ia mulai menawarkan produk Jerman Otto ke masyarakat Rusia. Ia mengambil pesanan, kemudian mengantarkannya lewat jaringan kantor pos ke wilayah lain di Rusia.

Kerja sama Bakalchuk dengan Jerman Otto dilakukan selama 4 tahun, sebelum akhirnya memutuskan untuk langsung terhubung dari pemegang merek satu ke merek lainnya. Beruntung, dewi fortuna berpihak pada Bakalchuk. Ia berhasil mengembangkan Wildberries hingga menawarkan 15 ribu merek pakaian sampai saat ini.

Boleh dibilang, bisnis ritel online pada tahun-tahun itu juga masih sangat langka. Tidak banyak kompetisi seperti sekarang. Laporan Morgan Stanley pada September 2018 lalu melansir bisnis e-commerce Rusia berkembang pesat hingga mencetak transaksi US\$18 miliar.

Wildberries sendiri tercatat menguasai 4,7 persen pangsa pasar di Rusia. Ia berada di urutan ketiga sebagai e-commerce terbesar setelah Yandex (10 persen) dan peritel raksasa dari China, Alibaba, dengan pangsa pasar 8,5 persen.

Laporan Morgan Stanley juga menyebut tidak ada yang paling menonjol dari ketiga e-commerce tersebut. Namun, Wildberries dapat memposisikan diri

sebagai peritel yang menawarkan masa depan bagi para ibu karena melayani penjualan pakaian, termasuk kebutuhan anak-anak.

Diperkirakan, lebih dari 2 juta orang dari Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, termasuk Kirgistan mengunjungi situs e-commerce Bakalchuk setiap harinya. Menurut catatan, perusahaan memproses rata-rata 400 ribu pesanan setiap harinya. Wildberries melayani penjualan pakaian, kosmetik, hingga mainan dan kebutuhan rumah tangga.

"Kami tidak dapat mengomentari rencana bisnis perusahaan, tetapi kami terus memperluas strategi usaha," tulis Wildberries.

Jeli Kelola Peluang

Bakalchuk, sang pendiri, merupakan lulusan Universitas Kolomna. Karakternya dikenal sebagai pribadi yang tertutup, namun berani.

Ia melihat peluang bisnis pertama kali dari buruknya jaringan kantor pos Rusia. Jerman Otto, supplier pertamanya kesulitan memasuki pasar Rusia, lantaran sistem pengiriman pos Rusia jauh tertinggal dari dunia Barat lainnya.

Namun, Bakalchuk berani mengambil risiko. Dengan angkutan umum, ia memborong produk-produk Jerman Otto,

dan membawanya pulang ke apartemen yang dijadikan sebagai gudang sementara. Dibantu sang suami dan rekannya Sergey Anufriev, Bakalchuk menekuni usahanya hingga dia mampu menyewa sebuah kantor kecil dan merekrut satu orang pekerja, pengembangan situs e-commerce.

Ia juga mengiklankan Wildberries demi menarik konsumen dan lompatan bisnisnya terjadi pada 2008, ketika krisis keuangan global membuat Adidas tertekan. Ketika itu, Bakalchuk memborong pakaian dan sepatu Adidas hingga 1 juta euro dan kembali menjual barang-barang itu di situs perusahaan.

Wildberries sukses menjadi pionir online shop dan menjadi salah satu dari 4 perusahaan paling bernilai di Rusia. Nama Wildberries semakin menggema ketika perusahaan menawarkan pembelian produk dengan skema cicil, dan menawarkan pengiriman gratis.

Forbes mencatat Wildberries memproses 1,1 juta pesanan pada momentum Black Friday 2017 lalu. Pada 2018 lalu, omzet Wildberries diperkirakan menyentuh US\$1,9 miliar pada 2018 lalu. Kesuksesan Wildberries sebagai superstore e-commerce menjadikan Bakalchuk perempuan terkaya di Rusia setelah Elena Baturina, istri dari walikota Moskow. (ist)

TATYANA BAKALCHUK

Lahir : Oblast Moskwa, Uni Soviet, 16 Oktober 1975 (umur 45)

Pekerjaan : Pendiri dan CEO Wildberries

Kekayaan bersih : US\$13.0 miliar (Februari 2020)

TENTANG WILDBERRIES

- Industry : E-commerce
- Founded : 2004
- Revenue : \$814 million (2017)
- Operating income : \$26.7 million (2017)
- Net income : \$7.34 million (2017)
- Total assets : \$336 million (2017)
- Total equity : \$29.1 million (2017)



FAMILY

HATI-HATI MAKAN SELAI KACANG TIAP HARI BISA BIKIN 'ENDUT'

Siapa di antara kamu yang hobi ngadain selain kacang? Selai kacang memang nikmat, rasanya manis, gurih, dan creamy, bisa membuat kita ketagihan. Pengin menikmatinya lagi dan lagi. Eits, sebelum kamu kebablasan, perlu diketahui kalo selai kacang juga punya efek pada tubuh, bisa bikin 'endut' alias berat badan naik.

Mengutip Eat This, ada banyak manfaat kesehatan bisa didapatkan dari mengonsumsi selai kacang. Tidak jarang, olesan satu ini sering dijadikan bahan makanan campuran. Seperti dalam jus, smoothie, kue, sampai salad khas Thailand.

Selain manfaat, makan selai kacang ternyata juga bisa berdampak pada kesehatan. Apalagi, kalau kamu menikmatinya setiap hari dengan porsi berlebihan. Maka dari itu, penting untuk kamu mengetahui apa saja manfaat dan dampak mengonsumsi selai kacang berikut ini:

Foto : <https://www.pexels.com>

Menangkal risiko kanker

Konsumsi kacang dipercaya membantu tubuh terhindar dari segala macam kanker. Menurut Hollie Zammit, RD, Ahli Diet di Orlando Health, kacang meminimalisasi penyakit kanker paru sampai pankreas.

"Diet rendah daging dan rutin makan kacang membantu menurunkan risiko penyakit kanker di tubuh. Ini karena berbagai sumber nutrisi bisa didapatkan. Misal vitamin, mineral, serat, dan fitokimia yang terkandung dalam kacang," jelas Zammit.

Mengurangi rasa lapar

Studi National Institutes of Health meyakini kalau makan selai kacang

dalam porsi yang sesuai dengan takaran satu kali makan, bisa membantu tubuh merasa kenyang lebih lama. Merasa kenyang tentu membuat kita lebih jarang ngemil. Oleh karenanya, jika merasa mulai lapar di luar jam makan utama, maka kamu boleh menjadikan selai kacang tanpa tambahan gula sebagai camilan alternatif.

Menyehatkan dan praktis

Terkadang menyiapkan makanan sehat membutuhkan waktu yang cukup lama. Lantaran, harus memilih bahan yang sesuai, lalu cara memasaknya pun tak boleh asal. Tapi, kalau kalian ingin makan sehat dan

terap praktis, konsumsi selai kacang sudah sangat cukup. "Cepat, sehat, dan nyaman. Selai kacang punya semua keunggulannya. Selai tersebut juga dianggap sebagai makanan nabati bergizi, serta menyehatkan jantung," terang Laura Burak, MS, RD, CDN.

Meningkatkan suasana hati jadi lebih baik

Selain sebagai bahan makanan yang lezat juga sehat, selai kacang mampu meningkatkan kondisi mood, lho. Rasanya yang creamy dan gurih, terkadang memang cocok dijadikan

pelengkap kudapan manis atau camilan lain. Tapi, tetap ingat, ya untuk selalu batasi jumlah konsumsinya, dan jangan memakannya setiap hari.

Berat badan naik

Meski memiliki segudang manfaat baik, selai kacang ternyata tinggi kalori, lho. Apalagi jika ditambah dengan pemanis buatan, membuat berat badan bisa langsung naik. Untuk mengakalinya agar tetap bisa menikmati selai kacang, maka pilihlah yang berlabel organik, dan jangan konsumsi lebih dari dua sendok makan. Cukup dua sendok atau kurang. (ist)

INFORMASI GIZI

| | |
|-------------------------|---------|
| Ukuran Porsi | 1 sdm |
| Per porsi | 394 kj |
| Energi | 94 kkal |
| Lemak | 8,06g |
| Lemak Jenuh | 1,647g |
| Lemak tak Jenuh Ganda | 2,219g |
| Lemak tak Jenuh Tunggal | 3,794g |
| Kolesterol | 0mg |
| Protein | 4,01g |
| Karbohidrat | 3,13g |
| Serat | 1g |
| Gula | 1,48g |
| Sodium | 73mg |
| Kalium | 104mg |

RINGKASAN GIZI:

Terdapat 94 kalori dalam Selai Kacang (1 sdm).

Rincian Kalori: 72% lemak, 12% karb, 16% prot.

| | |
|--------------------|--------|
| Ukuran porsi umum: | Kalori |
| Ukuran Porsi | 94 |
| 1 sdm | 94 |
| 1 porsi (16 g) | 94 |
| 1 ons | 167 |
| 100 gram (g) | 588 |



CEGAH WHATSAPPMU AGAR TAK DISADAP ORANG

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan yang rawan dibajak dan disadap atau mata-mata oleh orang yang tak dikenal. Bahayanya apabila akun baik di mobile maupun WhatsApp Web telanjur disadap, isi pesan yang bersifat pribadi akan bocor dan rawan disebarluaskan.

Sebetulnya WhatsApp sendiri sudah memberikan beberapa fitur keamanan yang bisa memperkuat akun agar tidak disadap maupun dibajak. Salah satu yang kini sedang dikampanyekan adalah penggunaan sistem keamanan end-to-end encryption yang diterapkan secara default.

Sistem end-to-end encryption ini memungkinkan hanya pengguna yang

berkomunikasi, baik dalam berkirim pesan, panggilan suara, dan video call WhatsApp yang dapat mengaksesnya. Misalnya, dengan enkripsi end-to-end, pesan teks biasa yang dikirim akan dienkripsi dan didekripsi hanya setelah mencapai perangkat penerima.

Sistem ini juga tidak membolehkan orang lain, termasuk pemerintah, peretas, penyedia telekomunikasi, penyedia internet, dan bahkan server tak dapat membaca pesan tersebut.

Tapi walau sudah punya sistem yang diklaim sebegitu kuat tapi ada saja celahnya. Maka dari itu dari pengguna sendiri harus lebih aktif mengatur keamanan WhatsApp yang sudah disediakan. Berikut cara yang harus diikuti jika tidak mau akun WhatsApp kamu disadap.

Foto: <https://www.pexels.com/>



AKTIFKAN VERIFIKASI DUA LANGKAH

Fitur keamanan two-step verification ini diklaim dapat mengamankan akun WhatsApp dari pembajakan dan penyadapan. Terlebih saat ini masih marak pembajakan akun WhatsApp melalui OTP (one-time password).

Dengan mengaktifkan fitur ini

setidaknya orang lain akan kesulitan untuk mengakses akun WhatsApp karena tidak mengetahui PIN two-step verification yang diset sebelumnya. Lalu bagaimana cara mengaktifkan fitur ini? Berikut langkahnya.

- Ketuk ikon tiga titik di pojok kanan

atas aplikasi WhatsApp di smartphone.

- Pilih menu "Settings."
- Masuk ke pengaturan "Account."
- Pilih "Two-step Verification."
- WhatsApp akan meminta kamu untuk mengaktifkan Two-step Verification menggunakan PIN. Tekan "Enable" di bagian bawah untuk mengaktifkannya.
- Buat PIN dengan memasukkan 6

digit angka sesuai dengan yang kamu inginkan. Hindari menggunakan kombinasi angka nomor ponsel, tanggal lahir atau alamat rumah.

- WhatsApp akan memintamu untuk memasukkan alamat email yang akan terintegrasi dengan akun WhatsApp, kalau suatu hari kamu ingin mengganti PIN.
- Selesai. Fitur Two-step Verification berhasil terpasang.

NONAKTIFKAN ATAU LOG OUT WHATSAPP WEB

Setiap kali menggunakan WhatsApp Web di mana pun, baik komputer atau laptop, pastikan jika sudah selesai, lakukan log out untuk memutuskan koneksi. Kamu bisa juga memutuskan koneksi melalui aplikasi WhatsApp dari ponsel dan dapat memeriksa status perangkat aktif terakhir di sana. Cara memutuskan bisa ikuti lang-

kahnya berikut ini.

- Ketuk ikon tiga titik di pojok kanan atas aplikasi WhatsApp di smartphone.
- Pilih menu "Settings."
- Tekan "WhatsApp Web," lalu pilih nama perangkat komputer/laptop dan pilih "Log out."

AKTIFKAN KEAMANAN BIOMETRIK DI APLIKASI WHATSAPP

Saat ini aplikasi WhatsApp, baik di Android dan iPhone memiliki fitur keamanan penguncian biometrik. Pengguna bisa mengaktifkan keamanan sidik jari atau face recognition untuk membuka aplikasi WhatsApp.

Jadi tidak bisa sembarang orang bisa membuka dan melakukan akses terhadap akun WhatsApp. Untuk mengaktifkan fitur ini ikuti langkah ini.

- Ketuk ikon tiga titik di pojok kanan atas aplikasi WhatsApp di smartphone.
- Pilih menu "Settings."
- Masuk ke pengaturan "Account."
- Cari bagian "Fingerprint lock," lalu tekan jari pilihan kamu untuk membuka aplikasi WhatsApp.
- Kemudian, untuk mengaktifkan scan wajah pilih "Face ID".
- Sekarang aman dari pengintaian.

LISTSTYLE**MAKEUP MUSIM PANAS ALA GIGI HADID
CERIA DENGAN EYELINER ORANYE**

Gigi Hadid bersiap menyambut musim panas. Dia memamerkan makeupnya yang menonjolkan eyeliner berwarna oranye yang cerah dalam unggahannya di Instagram akhir pekan lalu. Model 26 tahun ini tampaknya sedang menyiapkan proyek baru untuk makeup, namun dia belum menjelaskannya.

"Coming soon," tulis kakak Bella Hadid itu di keterangan, dengan emoji televisi dan bunga.

Tampilan riasan Gigi secara keseluruhan sangat netral dan sederhana, dengan pipi peachy dan bibir mawar netral, lengkap dengan lip liner dengan warna yang sama untuk menyempurnakan konturnya.

Alisnya disikat dan mengembang. Riasan mata Gigi adalah inti dari tampilannya, dengan dua semburan warna oranye terang yang semarak menghiasi sudut dalam matanya dan membuat rona biru-hijau bola matanya menonjol. Sedikit maskara dan beberapa kontur mata yang halus melengkapi momen riasan sehingga bayangan oranye dapat bersinar.

Gigi tidak menyebut produk apa yang dia gunakan untuk mendapatkan tampilan musim panasnya, tapi dia adalah wajah merek kosmetik New York, Amerika Serikat Maybelline. Jadi, sepertinya tampilan itu berasal dari beberapa produk Maybelline.

Dia juga menandai penata rambut Laura Polko, yang menata rambutnya

Foto: <https://www.youthbeauty.com/> EMAN

dengan gelombang panjang dan ringan, dan penata rias Patrick Ta. Penampilan Gigi dilengkapi dengan beberapa kalung manik-manik berlapis, blazer gading, dan cincin halus di jari manisnya.

Supermodel itu tampak menikmati musim panas 2021, baik melalui penampilan riasannya maupun gaya kasual dan kecenya yang khas. Gigi Hadid berbagi beberapa foto lucu dirinya dan putrinya Khai menikmati

kolam renang dan sinar matahari dalam pakaian renang hijau yang serasi, dan dia juga baru-baru ini keluar dengan atasan rajutan mustard, celana yang serasi, dan alas kaki putih. (ist)

TREN CERAH WARNA MAKE UP 2021**1. Makeup monokromatik masih tetap hits**

Konsep makeup monokromatik tidak hanya pulasan warna hitam dan putih. Makeup monokromatik adalah makeup dengan pilih warna yang senada, misalnya ungu atau pink. Anda bisa memadukannya dengan dua cara, yaitu paduan lipstick dan eye shadow satu warna atau eye shadow, blush dan lipstick dengan satu sentuhan.

2. Warna salmon dan orange masih dinikmati

Diakui kalau makeup warna salmon dan oranye masih akan jadi tren 2021. Banyak wanita yang melihat dua warna ini menonjolkan sisi segar dan awet muda dalam tampilan sehari-hari. Jadi, di tahun 2021 nanti masih akan ada banyak wanita yang gemar pakai makeup warna ini.

3. Makeup dua warna sudah tidak disukai

Kalau beberapa tahun belakangan

paduan makeup dua warna, seperti eye shadow hijau dan lipstick teracota, banyak digemari maka tahun 2021 nanti tidak akan lagi. Makeup dua warna sudah tidak disukai sehingga disarankan Anda melupakan gaya makeup tersebut dan beralih ke gaya baru.

4. Bibir merah kembali jadi idola

Lipstick merah seakan tidak pernah mati. Untuk tren makeup 2021, warna merah bata yang akan mendominasi. Tidak terlalu terang, bisa menonjolkan sisi elegan dari penampilan Anda, dan tetap menari perhatian.

5. Cat eye is back

Setelah lama ditinggalkan, eyeliner dengan gaya cat eye akan kembali jadi tren makeup 2021 nanti. Bedanya Anda bisa berkreasi dengan eyeliner aneka warna selain hitam, seperti coklat atau jingga. (*)

Foto: <https://www.pexels.com/>

Bom Bunuh Diri ... (dari hal 1)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat selama 2020. Dalam laporan tersebut, BPK mengkhawatirkan penambahan utang pemerintah selama tahun lalu.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara. Sehingga, pemerintah dikhawatirkan tidak mampu untuk membayar utang tersebut beserta bunganya.

"Memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," ujar Agung Firman dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/6).

BPK melaporkan, realisasi pendapatan negara dan hibah di tahun lalu sebesar Rp 1.647,78 triliun atau mencapai 96,93 persen dari anggaran. Sementara itu, realisasi belanja negara tahun lalu sebesar Rp 2.595,48 triliun atau mencapai 94,75 persen dari anggaran. Hal itu membuat defisit anggaran tahun 2020 dilaporkan sebesar Rp 947,70 triliun atau 6,14 persen dari PDB.

Meski demikian, realisasi pembiayaan tahun 2020 mencapai Rp 1.193,29 triliun atau sebesar 125,91 persen dari nilai defisitnya. Sehingga, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 245,59 triliun.

Realisasi pembiayaan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman dalam negeri, dan pembiayaan luar negeri sebesar Rp 1.225,9 triliun, yang berarti pengadaan utang tahun 2020 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit.

BPK juga mengungkapkan bahwa utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan/atau International Debt Relief (IDR) yakni, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen, melampaui rekomendasi IMF

sebesar 25-35 persen.

Selanjutnya, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-19 persen. Serta rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen.

Adapun hingga akhir Desember 2020, total utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun. Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019 lalu. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp 1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun.

Ditemukan Masalah di PEN

BPK juga menemukan sejumlah permasalahan terkait pelaksanaan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 atau PC-PEN. Hal ini berdasarkan dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, terdapat sejumlah permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Bahkan permasalahan yang terkait dengan Program PC-PEN meliputi beberapa hal.

"Pertama, mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada LKPP belum disusun," kata Agung. Kedua, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 minimal sebesar Rp 1,69 triliun juga dinilai tidak sesuai ketentuan.

Ketiga, pengendalian dalam pelaksanaan belanja Program PC-PEN sebesar Rp 9 triliun pada 10 Kementerian/Lembaga juga tidak memadai.

Keempat, penyaluran belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non KUR serta belanja lain-lain Kartu Prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program, sehingga ter-

dapat sisa dana kegiatan/program yang masih belum disalurkan sebesar Rp 6,77 triliun.

Kelima, BPK menemukan realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp 28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi.

"Keenam, pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang dilanjutkan di Tahun 2021," pungkasnya.

Tarik Utang Baru

Bank Dunia atau World Bank baru saja menyetujui pinjaman baru sebesar 500 juta dollar AS yang diajukan pemerintah Indonesia. Sebagaimana diberitakan, utang baru itu akan digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Beberapa di antaranya yakni penambahan tempat isolasi pasien Covid-19, tempat tidur rumah sakit, penambahan tenaga medis, lab pengujian, serta peningkatan pengawasan dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi.

Selain itu, pinjaman dari Bank Dunia juga akan dimanfaatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperluas program vaksinasi Covid-19. Sebelumnya pada 10 Juni 2021 lalu, Bank Dunia juga sudah menyetujui utang baru yang diajukan pemerintah Indonesia sebesar 400 juta dollar AS. Sehingga total utang baru yang ditarik Indonesia selama Juni 2021, yakni sudah mencapai sebesar 900 juta dollar AS atau setara dengan Rp 13,04 triliun (kurs Rp 14.480).

Terpisah, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, kebijakan penarikan utang baru itu tidak tepat. Menurutnya, ketimbang menambah utang baru, justru yang harusnya dilakukan adalah mengajukan fasilitas penghapusan pokok pinjaman atau keringanan bunga pinjaman kepada kreditur seperti Bank Dunia. "Iya jelas kurang pas. Penambahan utang sebaik-

nya dilakukan secara hati-hati," kata Bhima.

Penambahan utang, ujarnya, memiliki implikasi, terlebih dalam kurs asing terhadap beban bunga dan pokok yang harus dibayar. Pada saat ini, beban bunga utang diperkirakan naik menjadi Rp 373 triliun per tahun atau setara 25 persen penerimaan pajak. "Apalagi proyeksi Rupiah melemah akibat taper tantrum maka beban bunga utang pinjaman luar negeri akan naik signifikan," jelas dia.

Menurut Direktur PT.TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, utang ini juga yang menjadi alasan pemerintah takut melakukan lockdown. "Ini yang menjadi persoalan utama mengapa pemerintah tidak melakukan lockdown," ujarnya, Selasa (22/6).

Menurutnya, dalam kondisi saat ini, apabila jika satu wilayah memutuskan untuk lockdown maka pemerintah harus menghitung ulang estimasi biaya yang dibutuhkan. Seperti DKI Jakarta misalnya, biaya untuk mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Ibu Kota jika di lockdown bisa mencapai Rp550 miliar per hari. "Jika 1 bulan maka Pemerintah harus menyipakan anggaran sebesar Rp 16,5 Triliun," jelas dia.

Disisi lain, PPKM Mikro membuat ekonomi begitu terpuruk. Sebab, PPKM Mikro hanya mewajibkan para pekerja bekerja dari rumah sebanyak 75% untuk zona merah, dan 50% untuk di luar zona merah. "Para pelajar juga wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring untuk zona merah," jelasnya.

Kemudian untuk kegiatan sektor esensial seperti pelayanan dasar publik dan tempat kebutuhan pokok bisa berjalan dengan kapasitas 100%. Sementara untuk restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak di pasar dan pusat perbelanjaan memiliki kapasitas pengunjung 25% dengan jam operasional hanya sampai pukul 20:00 WIB.

Ia juga menyatakan, kegiatan di mal, pasar, dan pusat perdagangan maksimal sampai pukul 20.00 dan pembatasan pengunjung 25% dari kapasitas. "Untuk taman umum dan area publik lainnya di zona merah ditutup sementara," terangnya.(ist,ins)

BEBERAPA NEGARA YANG PERNAH MENGALAMI DEFAULT



1. YUNANI

Yunani mengalami default pada tahun 2015 sekaligus menjadi negara maju pertama yang mengalami default. Yunani memiliki utang sebesar 1,6 miliar euro kepada Dana Moneter Internasional. Bermula dari krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008. Karena default, seluruh perbankan di Yunani ditutup untuk mencegah warga mereka menarik uang mereka di bank, sementara sebelumnya penarikan harian di Bank dibatasi hanya sebesar 60 Euro atau sekitar Rp.887 ribu. Tingkat pengangguran pun melonjak hingga di atas 25%. Negara Eropa kemudian bersatu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Yunani.



2. ZIMBABWE

Default Zimbabwe disebabkan oleh pemimpin mereka, Robert Mugabe yang dikabarkan berfoya-foya di atas penderitaan rakyatnya yang miskin. Semua bermula pada tahun 2008 dimana di Zimbabwe terjadi hiperinflasi yang sangat tinggi. Inflasi bulanan pada tahun 2008 di Zimbabwe diperkirakan mencapai 7,9 miliar persen. Dengan inflasi yang hyper tersebut, Zimbabwe kemudian mengalami kekacauan dalam negeri, pengangguran yang parah dan perekonomian yang hancur hingga 18%. Nilai mata uang dolar Zimbabwe seolah tidak bernilai pada tahun 2009, sehingga transaksi keuangan dilakukan dalam dolar Amerika Serikat atau mata uang Afrika Selatan.



3. ARGENTINA

Argentina pernah mengalami dua kali dinyatakan default. Yang pertama terjadi pada tahun 2002 dan yang kedua terjadi pada tahun 2014. Setelah dinyatakan default pada tahun 2002, Argentina melakukan restrukturisasi utang pada tahun 2005 dan 2010. Namun pada tahun 2014 Argentina menyatakan bahwa mereka tidak dapat melunasi utang kepada investor yang jumlahnya mencapai US\$13 miliar atau kurang lebih setara Rp.174 Triliun. Awal mula Argentina mengalami default ditengarai karena kegaduhan politik yang terjadi sehingga berdampak pada kondisi perekonomian negara tersebut.



NOW!!!



Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

KUSUNADI, SH., M.Hum
KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

H. ANWAR SADAD, M.Ag
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

SAHAT TUA P. SIMANJUNTAK, SH
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

DPRD JATIM MONITORING PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI DAERAH

SURABAYA – Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 17 dan 25 Tahun 2021, maka sudah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah untuk melakukan penyederhanaan struktur organisasi. Bahkan untuk usulan penyederhanaan itu ditarget pada 30 Juni ini sudah sampai ke pemerintah pusat.

Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur terus melakukan monitoring terhadap realisasi kebijakan tersebut. Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzamil Syafi'i mengatakan bahwa usulan dari pemerintah kabupaten dan kota sudah masuk pada tanggal 17 Juni kemarin. Kemudian nanti akan disampaikan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB dan Kemendagri paling lambat tanggal 30 Juni mendatang.

Lebih lanjut, politisi yang akrab dengan panggilan Buaya ini menjelaskan bahwa Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi sudah menjadi keharusan.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa sesuai dengan dua Permenpan RB itu, maka ada dua hal yang harus dilakukan dalam penyederhanaan struktur organisasi tersebut. Yang pertama adalah penyederhanaan pada Struktur Organisasinya, kemudian yang kedua adalah pada jabatan strukturalnya.

"Di berapa daerah itu sudah melakukan analisa terkait dengan orang-orang yang eselon 4 dan 3 yang difungsionalkan. Memang ini tujuannya adalah untuk melakukan perampingan organisasi, tapi dengan kaya fungsi. Kalau dulu itu jenjang yang dilalui cukup panjang, ada staf, ada Kasubsi, ada Kasi, baru sampai ke Kepala Dinas, kalau sekarang dipangkas. Nah ini untuk mempercepat proses pengambilan kebijakan," katanya.

Mekanisme penyetaraan jabatan sendiri akan terjadi pada eselon III, IV, dan V. Diantaranya pada jabatan administrasi (Administrator, pengawas) yang disetarakan pada jabatan fungsional ahli (Madya, Muda, Pertama) dengan kesetaraan dan pengembangan karir. Kemudian pada penghasilan kelas dan tunjangan jabatan (administrator, pengawas) disetarakan

tanpa mengurangi peng-hasilan. Selanjutnya pada struktur dan komando dimana disetarakan fungsi dan peran koordinator, subkoordinator.

Namun, lanjut politisi yang pernah menjabat sebagai wakil Bupati Pasuruan ini, masih ada beberapa kendala yaitu belum meratanya persepsi tentang fungsional. Sehingga, bagi sebagian orang merasa enggan ketika difungsionalkan dan kehilangan jabatan. Padahal, seharusnya dari sisi take home pay, bisa saja malah memperoleh nilai lebih tinggi kalau dianalisis berdasarkan fungsional yang dikerjakan.

"Nah, terkait kendala itu ya memang itu harus terinci betul tentang tupoksinya, tugas tugas apa yang diemban, kemudian pekerjaan apa yang diemban. Sehingga dalam satu hari itu dia bisa bekerja sekian jam kemudian menyelesaikan semua persoalan. Jangan kemudian pekerjaannya tidak ada, kemudian yang seharusnya kerja berapa jam itu selesai dalam satu jam," tegasnya.

Dia menandakan, dampak ke depan dari kebijakan tersebut adalah akan lebih efektif dan efisien baik dari sisi birokrasi maupun dari sisi anggaran. "Dalam proses ini, peran komisi A adalah memfasilitasi. Kalau di tingkat provinsi kita yang membahas, kita sudah beberapa kali melakukan restrukturisasi khususnya di beberapa tempat. Cuman memang kadang kala kesulitan memberikan penghargaan orang-orang yang senior kemudian tidak punya jabatan, ya ini tidak enak," katanya.

Terpisah, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Ahmad Firdaus Febrianto juga mengatakan bahwa pihaknya terus monitoring progres rencana usulan perampingan organisasi yang diajukan pemkot atau pemkab di wilayah Jatim.

"Ya, 30 Juni nanti sudah harus diajukan. Jadi ya kita berharap nanti ada perampingan birokrasi termasuk mungkin ada yang digabungkan atau jabatan struktural yang dialihkan," kata politisi asal Fraksi Partai Gerindra ini.

Firdaus mencontohkan, apabila PNS/ASN sebelumnya menduduki jabatan wakil kepala dinas atau biro, maka setelah ada perampingan OPD akan dialihkan menjadi jabatan fungsional. "Jadi kompetensinya lebih ditekankan ke fungsional, tidak semuanya di struktural," katanya.

Karena itu, pihaknya memastikan akan terus mendorong Pemprov Jatim agar segera mengakomodir semua formasi di kabupaten dan kota. Apa-

lagi, permasalahan atau kebutuhan di masing-masing daerah tentu tidak sama. Dia mencontohkan Dinas Pertanian di satu daerah itu penting, namun untuk di kota mungkin bisa dimerger atau digabungkan dengan yang lain karena tak punya lahan pertanian.

"Nah, dari beberapa variasi ini coba dicarikan format yang pas oleh provinsi nanti disampaikan ke pemerintah pusat, melalui Kemendagri dan Kemenpan RB," jelas politisi asal Lamongan ini.

Menurut Firdaus, saat ini formasi rencana perampingan birokrasi masih terus dimatangkan. Kemudian, tanggal 30 Juni 2021, semua usulan dari kota/kabupaten harus dimasukkan ke Pemprov Jatim dan selanjutnya diajukan ke pemerintah pusat.

"Jadi nanti usulan masuk dulu sampai akhir Juni. Kemudian nanti digodok dan akhirnya muncul regulasi dan diterapkan. Sehingga nanti jabatannya tidak lagi banyak di struktural, tapi sudah dialihkan fungsional yang dipentingkan," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya mengakui jika permasalahan di setiap daerah itu berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang ada itu bisa di-formatkan menjadi satu untuk dicarikan solusi.

"Karena Biro Organisasi (Pemprov Jatim) ini kan mitranya Komisi A. Sehingga kita yang monitor keseluruhan, kira-kira permasalahan di daerah itu apa saja," pungkasnya.



Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzamil Syafi'i

Disatu sisi, Anggota Komisi A DPRD Jatim yang lain, Mochammad Aziz, mengatakan bahwa masih ada kebingungan pada tingkat daerah terkait dengan model penyederhanaan struktur organisasi. Sebab dari pemerintah membuat tiga model, sementara pemerintah daerah kebanyakan meminta supaya dilakukan penyeragaman.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menandakan bahwa pengajuan dari daerah-daerah terkait penyederhanaan struktur birokrasi tersebut hanya dianggap sebuah usulan oleh Kemenpan RB. Dari tiga model penyederhanaan tersebut maka tergantung dari pemerintah daerah mau memilih yang mana. Untuk itu, dia mengharapkan nantinya ada penyeragaman penyederhanaan birokrasi sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (ufi/adv)

UNIT KERJA YANG DISEDERHANAKAN & DIPERTAHANKAN

Surat Menteri Dalam Negeri No. 800/ 2603/OTDA, Tgl 22 April 2021

| Provinsi | | Kabupaten | |
|--|--|----------------------|--|
| Administrator | Pengawas | Administrator | Pengawas |
| 1. Dinas/Badan/set.DPRD/ Inspektorat (selain sekretariat daerah) | Kasubbag TU pada Biro/Badan/Dinas/ Inspektorat/Set. DPRD | TIDAK DISEDERHANAKAN | Kasubbag TU atau sebutan lain pada sekretaris daerah |
| 2. Bagian Keuangan pad Setda | Sekretariat Dinas/Badan/ Set DPRD Inspektorat | | Sekretariat Dinas/Badan/ Sekretariat DPRD Inspektorat |
| 3. Bagian Umum pad Setda | Biro/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | | Bagian/Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa |
| 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | Rumah Sakit Daerah | | Rumah Sakit Daerah |
| 5. Bagian Cabang Dinas | Kasubbag TU atau sebutan lain Rumah Sakit Daerah | | UPT |
| 6. Bagian UPT | Badan Penghubung | | Kecamatan/Kelurahan |
| 7. Bagian Badan Penghubung | Cabang Dinas | | Setingkat Seksi/Subbidang (pasal 18 ayat (8) dan ayat (10) PP 18/ 2016 ttg PD) |
| 8. Rumah Sakit Daerah | Setingkat Seksi/Subbidang (pasal 18 ayat (8) dan ayat (10) PP 18/ 2016 ttg PD) | | |